
ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PARIWISATA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh

Arllen Tatty Hansang¹, Wilson Bogar², Goinpeace H. Tumbel³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

E-mail: ¹tattyarllen@gmail.com, ²Wilsonbogar@unima.ac.id,

³goinpeacetumbel@unima.ac.id

Article History:

Received: 17-10-2024

Revised: 06-11-2024

Accepted: 20-11-2024

Keywords:

Penatausahaan,
Akuntansi,
Bendahara
Penerimaan,
Transparansi,
Akuntabilitas

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penatausahaan dan akuntansi bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Fokus utama penelitian adalah prosedur penerimaan dan penyetoran pendapatan, pencatatan dan pelaporan transaksi penerimaan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses penatausahaan telah mengacu pada peraturan yang berlaku, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan, seperti kesalahan manual, keterlambatan penyetoran, dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, penggunaan perangkat lunak akuntansi menghadapi kendala jaringan dan fitur yang tidak komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan SDM, pengembangan perangkat lunak, adopsi sistem pencatatan digital, serta pengawasan internal yang lebih ketat. Implementasi perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bertanggung jawab dalam mengelola sumber PAD yang berasal dari retribusi wisata. Pengelolaan keuangan ini tidak hanya membutuhkan prosedur yang sistematis, tetapi juga harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan [1], [2], [3].

Penatausahaan keuangan, khususnya oleh bendahara penerimaan, mencakup proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan seluruh transaksi keuangan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap penerimaan dicatat secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Akuntansi keuangan berperan dalam menyediakan informasi keuangan yang dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi menjadi elemen penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan [4], [5].

Namun, pelaksanaan penatausahaan keuangan tidak luput dari berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering ditemukan meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kesalahan pencatatan akibat human error, dan keterbatasan penggunaan perangkat lunak yang mendukung pengelolaan keuangan. Tantangan ini dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dan menimbulkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan [6], [7].

Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga menghadapi tantangan akibat dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam PAD pada tahun 2020. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan, sehingga berdampak langsung pada penerimaan dari retribusi wisata. Meskipun terjadi peningkatan kembali pada tahun-tahun berikutnya, seperti tahun 2021 dan 2022, masih diperlukan strategi yang efektif untuk memulihkan dan meningkatkan PAD pascapandemi.

Proses penatausahaan bendahara penerimaan melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari prosedur penerimaan dan penyetoran hingga pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Pengawasan dan pengendalian internal menjadi kunci dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Elemen ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah kesalahan dan kecurangan, tetapi juga mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan [8], [9], [10].

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan adalah dengan mengoptimalkan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Pelatihan yang memadai dapat membantu meningkatkan kemampuan bendahara penerimaan dalam mengelola administrasi keuangan dengan lebih baik. Selain itu, penerapan teknologi dan perangkat lunak yang sesuai dapat memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan, serta meminimalkan risiko kesalahan [11], [12].

Dalam menjalankan tugasnya, bendahara penerimaan juga harus mematuhi prinsip-prinsip integritas dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini merupakan fondasi dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang berkualitas. Kepatuhan terhadap peraturan daerah dan kebijakan pemerintah menjadi indikator penting untuk memastikan tata kelola yang baik dan berkelanjutan [13], [14].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penatausahaan dan akuntansi yang dilakukan oleh bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di instansi tersebut, sehingga dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan PAD di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang penatausahaan dan akuntansi bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kondisi, fenomena, serta proses yang sedang berlangsung terkait pengelolaan keuangan di instansi tersebut. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh tidak hanya

dikumpulkan tetapi juga dianalisis secara sistematis dan menyeluruh untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai subjek penelitian [15], [16], [17].

Penelitian ini berfokus pada proses penatausahaan dan akuntansi yang dilakukan oleh bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata. Penatausahaan mencakup prosedur penerimaan dan penyetoran, pencatatan dan pelaporan transaksi penerimaan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Akuntansi, di sisi lain, menitikberatkan pada kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan penggunaan perangkat lunak akuntansi yang mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kedua aspek tersebut berjalan secara sistematis di lapangan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di Jl. Maengket No 33, Manado. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan informasi mendalam dari bendahara penerimaan sebagai informan kunci. Jika diperlukan, teknik snowballing sampling akan digunakan untuk memperoleh informasi tambahan hingga mencapai titik jenuh. Pemilihan informan ini dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat mencerminkan situasi nyata yang relevan dengan penelitian.

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait proses penatausahaan dan akuntansi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas di lapangan, sementara dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen keuangan yang relevan. Ketiga teknik ini digunakan secara komplementer untuk memastikan data yang diperoleh lengkap dan akurat [18], [19], [20].

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dokumen keuangan yang berkaitan langsung dengan penatausahaan dan akuntansi, sementara data sekunder mencakup literatur dan jurnal terkait. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, alat perekam, dan alat tulis untuk mencatat data penting yang diperoleh selama proses penelitian [21], [22].

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan model interaktif yang melibatkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi untuk memisahkan informasi yang relevan dan tidak relevan. Setelah itu, data yang tersaring disajikan dalam bentuk deskripsi yang terstruktur dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan [23], [24].

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui pengujian kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dilakukan dengan triangulasi data dari berbagai sumber dan teknik. Transferabilitas memastikan bahwa hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks lain. Dependabilitas dilakukan melalui audit terhadap seluruh proses penelitian, sementara konfirmabilitas memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan proses yang dilakukan [20], [25], [26].

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan dengan beberapa tahapan, yaitu penyusunan proposal, ujian proposal, pengambilan data dan wawancara, analisis data, konsultasi hasil penelitian, hingga penyelesaian revisi tesis. Setiap tahapan

dirancang untuk memastikan penelitian dilakukan secara sistematis dan menghasilkan data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penatausahaan Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penatausahaan bendahara penerimaan yang meliputi prosedur penerimaan dan penyetoran pendapatan, pencatatan dan pelaporan transaksi penerimaan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa proses penerimaan pendapatan di objek wisata Sumaru Endo dan Bukit Kasih memiliki prosedur yang sistematis, meskipun masih menggunakan metode manual. Jenis penerimaan kas yang dominan di Sumaru Endo adalah penginapan (cottage) dan kolam renang, sedangkan di Bukit Kasih adalah karcis masuk baik untuk orang maupun kendaraan.

Prosedur penyetoran pendapatan ke Bank Sulut dilakukan secara berkala, biasanya seminggu sekali hingga tiga kali, tergantung pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Dalam proses ini, bendahara penerimaan membawa slip setoran berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) untuk menyetor uang ke kas daerah. Namun, beberapa kendala teknis seperti jarak tempuh yang jauh dari lokasi wisata ke bank dapat menghambat efisiensi penyetoran.

Pencatatan dan pelaporan transaksi penerimaan dilakukan dengan menggunakan kombinasi sistem informasi dan pencatatan manual. Bendahara penerimaan mencatat semua transaksi berdasarkan bukti karcis yang terpakai dan menghasilkan laporan harian, mingguan, dan bulanan, termasuk laporan realisasi anggaran (LRA) dan berita acara rekonsiliasi. Meskipun pencatatan ini dilakukan secara berjenjang, ditemukan adanya keterlambatan dan kesalahan manual dalam proses pencatatan, yang menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pengawasan dan pengendalian internal merupakan aspek penting dalam memastikan semua transaksi tercatat secara transparan dan sesuai aturan. Sistem pengawasan internal di Dinas Pariwisata melibatkan pelaporan berjenjang, rekonsiliasi dengan bagian akuntansi, dan penggunaan grup komunikasi untuk memantau laporan secara real-time. Namun, terdapat kelemahan dalam audit internal dan komunikasi yang efektif, yang dapat memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses penatausahaan bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan perbaikan dalam hal sumber daya manusia, penggunaan teknologi, dan pengawasan internal. Berikut tabel yang merangkum temuan penelitian:

**Tabel 1. Temuan Penelitian Penatausahaan Bendahara Penerimaan
Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

Sub Fokus Penelitian	Temuan di Lapangan
Prosedur Penerimaan dan Penyetoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan bukti transaksi manual menyebabkan potensi kesalahan administratif. 2. Proses penyetoran terkendala jarak ke bank dan tidak selalu tepat waktu. 3. Kompetensi SDM perlu ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan yang lebih baik.
Pencatatan dan Pelaporan Transaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan dan kesalahan manual dalam pencatatan transaksi. 2. Laporan yang dihasilkan mencakup laporan harian, mingguan, bulanan, LRA, dan berita acara rekonsiliasi. 3. Penggunaan sistem informasi masih terbatas, sehingga back-up data manual tetap diperlukan.
Pengawasan dan Pengendalian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya audit internal yang terstruktur. 2. Pengawasan dilakukan melalui laporan berjenjang dan komunikasi digital, tetapi masih terdapat kekurangan dalam komunikasi efektif. 3. Kompetensi SDM dalam pengawasan perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas.

Sumber : Hasil Analisis Data Kualitatif, Penelitian 2024

Akuntansi Bendahara Penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Penelitian ini menemukan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara umum telah mengikuti peraturan dan standar akuntansi pemerintahan. Bendahara penerimaan memastikan semua prosedur mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Keuangan Daerah, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan No. 77 Tahun 2020. Namun, ditemukan bahwa pemahaman terhadap aturan ini masih terbatas di beberapa bagian, terutama karena kurangnya pelatihan teknis yang relevan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Salah satu kendala yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman mendalam terhadap peraturan dan standar akuntansi oleh beberapa petugas terkait. Hal ini diperburuk oleh pelatihan yang kurang memadai dalam pengelolaan keuangan berbasis akuntansi pemerintah. Selain itu, pengawasan yang dilakukan masih belum optimal, sehingga potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya dapat dicegah.

Dalam pengelolaan akuntansi, Dinas Pariwisata menggunakan dua perangkat lunak utama, yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kemendagri dan Sistem Informasi Penatausahaan Daerah (SIPANDA) yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi

Sulawesi Utara. Perangkat lunak ini digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan berdasarkan bukti setoran (STS) serta pelaporan bulanan. Rekonsiliasi keuangan dilakukan setiap bulan antara bendahara penerimaan, bagian akuntansi dinas, dan BPKAD Provinsi Sulawesi Utara.

Meskipun perangkat lunak ini membantu proses akuntansi, terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh pengguna. Salah satu masalah utama adalah gangguan jaringan yang sering terjadi, terutama pada aplikasi SIPD, yang digunakan secara nasional. Gangguan ini menyebabkan keterlambatan dalam penginputan data dan memengaruhi efisiensi pekerjaan.

Selain gangguan jaringan, fitur perangkat lunak yang digunakan dianggap belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengelolaan keuangan yang kompleks. Beberapa pengguna mengungkapkan bahwa aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan. Hal ini menjadi tantangan utama dalam memastikan pencatatan dan pelaporan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

Dalam menghadapi kendala perangkat lunak, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang bertugas mengelola akuntansi. Pengembangan keterampilan teknis melalui pelatihan intensif mengenai penggunaan aplikasi akuntansi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan. Selain itu, bimbingan terkait pemahaman peraturan dan standar akuntansi juga menjadi kebutuhan mendesak.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata telah sesuai dengan peraturan, namun terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Gangguan jaringan, fitur perangkat lunak yang kurang memadai, dan keterbatasan kompetensi SDM menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan perangkat lunak, pelatihan SDM, serta pengawasan yang lebih ketat untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Tabel 2. Temuan Penelitian Akuntansi Bendahara Penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Sub Fokus Penelitian	Temuan di Lapangan
Kepatuhan terhadap Peraturan dan Standar Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terhadap aturan masih terbatas. 2. Pelatihan teknis belum memadai. 3. Kompetensi SDM perlu ditingkatkan. 4. Pengawasan belum optimal.
Perangkat Lunak Akuntansi yang Digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fitur perangkat lunak kurang komprehensif. 2. Kinerja sistem lambat akibat gangguan jaringan. 3. Pengembangan SDM dalam penggunaan perangkat lunak masih diperlukan.

Sumber : Hasil Analisis Data Kualitatif, Penelitian 2024

Pembahasan

Penelitian ini membahas analisis penatausahaan dan akuntansi bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan fokus pada prosedur penerimaan dan penyetoran pendapatan, pencatatan dan pelaporan transaksi penerimaan,

serta pengawasan dan pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur dan perangkat yang digunakan telah mengacu pada peraturan, masih ditemukan berbagai kelemahan yang memerlukan perhatian dan perbaikan.

Prosedur penerimaan pendapatan dilakukan secara manual, dengan bukti transaksi berupa karcis masuk yang diterima oleh petugas pemungut retribusi. Namun, ditemukan masalah berupa selisih kas akibat kesalahan dalam penghitungan uang tunai yang diterima. Lemahnya kontrol sistematis dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor utama penyebab terjadinya masalah ini. Di sisi lain, prosedur penyetoran pendapatan ke kas daerah juga menghadapi kendala, seperti keterlambatan penyetoran dan kendala teknis. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi proses penyetoran agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses pencatatan dan pelaporan transaksi penerimaan dilakukan secara manual dan digital. Bendahara penerimaan mencatat setiap transaksi berdasarkan bukti setoran (STS) dan menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan. Namun, penelitian menemukan adanya keterlambatan pencatatan, kesalahan manual, dan lemahnya dokumentasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi SDM dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam pelaporan.

Pengawasan internal dilakukan melalui laporan harian dan mingguan yang dipantau oleh kepala dinas dan pejabat eselon terkait. Meski demikian, kurangnya audit internal dan mekanisme pelaporan yang efektif menjadi kelemahan yang perlu diperbaiki. Komunikasi internal juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pengendalian yang lebih efektif dan mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Bendahara penerimaan telah berupaya mematuhi peraturan yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2008. Namun, pemahaman terhadap aturan ini masih terbatas di beberapa bagian, yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan teknis dan pembekalan regulasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkala dan sosialisasi peraturan.

Dinas Pariwisata menggunakan dua perangkat lunak utama, yaitu SIPD dari Kemendagri dan SIPANDA dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Perangkat lunak ini digunakan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan. Namun, fitur yang kurang komprehensif dan gangguan jaringan menjadi kendala dalam penggunaannya. Selain itu, kurangnya penguasaan perangkat lunak oleh SDM turut memengaruhi efisiensi kerja.

Kinerja perangkat lunak yang tidak optimal menyebabkan pekerjaan menjadi kurang efisien dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan fitur perangkat lunak dan peningkatan pelatihan teknis bagi pengguna untuk memastikan akurasi data dan kemudahan kerja. Sistem yang andal akan mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Salah satu temuan penting adalah lemahnya sistem dokumentasi. Dokumen yang tidak tersimpan dengan baik dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan membuka peluang untuk terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem dokumentasi yang sistematis dan terintegrasi untuk memastikan semua data tersimpan dengan baik.

Kompetensi SDM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan tata kelola keuangan. Pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan

pemahaman terhadap peraturan, penggunaan perangkat lunak, dan pengelolaan keuangan secara umum. Dengan SDM yang kompeten, risiko kesalahan dan penyimpangan dapat diminimalkan [27], [28], [29].

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dengan memastikan semua transaksi dicatat secara akurat dan sesuai dengan peraturan, bendahara penerimaan dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik [30], [31], [32].

Untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ditemukan, disarankan untuk meningkatkan pelatihan SDM, mengembangkan perangkat lunak yang lebih andal, memperkuat pengawasan internal, dan mengadopsi sistem pencatatan non-tunai seperti QRIS. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah [33], [34], [35].

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan kelemahan signifikan dalam penatausahaan dan akuntansi bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Prosedur penerimaan pendapatan masih menggunakan metode manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan penyeteroran. Sistem pencatatan dan pelaporan transaksi juga belum optimal, ditandai dengan kesalahan manual dan lemahnya dokumentasi. Selain itu, pengawasan internal belum memadai karena kurangnya audit dan mekanisme pengendalian yang efektif, yang meningkatkan risiko penyimpangan. Kepatuhan terhadap peraturan seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 juga masih rendah, serta penggunaan perangkat lunak akuntansi menghadapi kendala teknis dan kurangnya kompetensi pengguna.

Diperlukan pelatihan teknis secara berkala untuk meningkatkan pemahaman bendahara terkait peraturan dan prosedur penatausahaan. Sistem pencatatan digital yang terintegrasi, seperti non-tunai dan QRIS, harus diadopsi untuk mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses pencatatan. Penguatan kompetensi sumber daya manusia dan adopsi teknologi yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi tata kelola keuangan.

Pengawasan internal perlu diperkuat dengan audit rutin dan mekanisme kontrol berjenjang. Komunikasi antar bagian harus ditingkatkan untuk mendorong efisiensi dan koordinasi dalam proses pengelolaan keuangan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, potensi penyimpangan dapat diminimalkan, sementara akuntabilitas tata kelola keuangan meningkat.

Perbaikan fitur dan stabilitas perangkat lunak akuntansi seperti SIPD dan SIPANDA menjadi prioritas, diiringi dengan pelatihan intensif untuk meningkatkan penguasaan pengguna. Sistem dokumentasi yang sistematis dan terintegrasi juga harus diterapkan agar semua bukti transaksi tersimpan rapi dan mudah diakses untuk keperluan pelaporan atau audit.

Sosialisasi regulasi akuntansi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh dan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap tata kelola keuangan harus dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang berulang dan memastikan perbaikan berkelanjutan.

Teknologi seperti aplikasi pemantauan real-time dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan implementasi teknologi ini, tata kelola keuangan yang lebih baik dapat tercapai, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. del R. Moreno-Enguix, E. Gras-Gil, and J. Henández-Fernández, "Relation between internet financial information disclosure and internal control in Spanish local governments," *Aslib J. Inf. Manag.*, vol. 71, no. 2, pp. 176–194, Mar. 2019, doi: 10.1108/AJIM-06-2018-0150.
- [2] R. Krah and G. Mertens, "Democracy and financial transparency of local governments in Sub-Saharan Africa," *Meditari Account. Res.*, vol. 28, no. 4, pp. 681–699, Mar. 2020, doi: 10.1108/MEDAR-08-2019-0539.
- [3] E. De Simone, M. Bonasia, G. L. Gaeta, and L. Cicatiello, "The effect of fiscal transparency on government spending efficiency," *J. Econ. Stud.*, vol. 46, no. 7, pp. 1365–1379, Nov. 2019, doi: 10.1108/JES-03-2019-0123.
- [4] G. R. Brás and K. M. Dowley, "Impact of demographic, political and financial factors on municipal transparency: a dynamic panel approach," *Int. J. Public Sect. Manag.*, vol. 34, no. 2, pp. 101–117, Feb. 2021, doi: 10.1108/IJPSM-11-2019-0289.
- [5] M. Varmus, M. Kubina, M. Mičiak, M. Šarlák, and I. Greguška, "Sustainable Management of the Public Financial Model for Sports Support in Slovakia," *Sustainability*, vol. 15, no. 14, p. 11310, Jul. 2023, doi: 10.3390/su151411310.
- [6] L. K. Yang, "Auditor or Adviser? Auditor (In)Dependence and Its Impact on Financial Management," *SSRN Electron. J.*, 2020, doi: 10.2139/ssrn.3622184.
- [7] A. Banerjee, E. Duflo, C. Imbert, S. Mathew, and R. Pande, "E-governance, Accountability, and Leakage in Public Programs: Experimental Evidence from a Financial Management Reform in India," *Am. Econ. J. Appl. Econ.*, vol. 12, no. 4, pp. 39–72, Oct. 2020, doi: 10.1257/app.20180302.
- [8] H. Kang and G. Chen, "Can better financial conditions lead to more fiscal transparency? Evidence from municipalities in California," *Local Gov. Stud.*, vol. 48, no. 5, pp. 821–841, Sep. 2022, doi: 10.1080/03003930.2021.1919634.
- [9] T. Wang, P. Wu, Q. Ge, and Z. Ning, "Ticket prices and revenue levels of tourist attractions in China: Spatial differentiation between prefectural units," *Tour. Manag.*, vol. 83, p. 104214, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.tourman.2020.104214.
- [10] N. Rahmatul Putra, A. Frinaldi, and L. Magriasti, "THE ROLE OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUE IN SUPPORTING FISCAL DECENTRALIZATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (Study of Regional Revenue Agency of West Sumatra Province)," *Sustain. Theory, Pract. Policy*, vol. 3, no. 1, pp. 11–24, Oct. 2023, doi: 10.30631/sdgs.v1i1.1813.
- [11] S. Iacuzzi, "An appraisal of financial indicators for local government: a structured literature review," *J. Public Budgeting, Account. Financ. Manag.*, vol. 34, no. 6, pp. 69–94, Dec. 2022, doi: 10.1108/JPBAFM-04-2021-0064.
- [12] A. Navarro-Galera, L. Alcaide-Muñoz, M. D. López-Subires, and M. P. Rodríguez-Bolívar,

- “Identifying risk determinants of the financial sustainability of regional governments,” *Public Money Manag.*, vol. 41, no. 3, pp. 255–263, Apr. 2021, doi: 10.1080/09540962.2019.1684025.
- [13] J. Omukuti, S. Barrett, P. C. L. White, R. Marchant, and A. Averchenkova, “The green climate fund and its shortcomings in local delivery of adaptation finance,” *Clim. Policy*, vol. 22, no. 9–10, pp. 1225–1240, Nov. 2022, doi: 10.1080/14693062.2022.2093152.
- [14] Z. Tang, Z. Zhang, and W. Deng, “Government Environmental Expenditure, Budget Management, and Regional Carbon Emissions: Provincial Panel Data from China,” *Sustainability*, vol. 16, no. 15, p. 6707, Aug. 2024, doi: 10.3390/su16156707.
- [15] K. Roberts, A. Dowell, and J.-B. Nie, “Attempting rigour and replicability in thematic analysis of qualitative research data; a case study of codebook development,” *BMC Med. Res. Methodol.*, vol. 19, no. 1, p. 66, Dec. 2019, doi: 10.1186/s12874-019-0707-y.
- [16] J. Ellis and D. Hart, “Strengthening the Choice for a Generic Qualitative Research Design,” *Qual. Rep.*, Jun. 2023, doi: 10.46743/2160-3715/2023.5474.
- [17] J. Sibeoni, L. Verneuil, E. Manolios, and A. Révah-Levy, “A specific method for qualitative medical research: the IPSE (Inductive Process to analyze the Structure of lived Experience) approach,” *BMC Med. Res. Methodol.*, vol. 20, no. 1, p. 216, Dec. 2020, doi: 10.1186/s12874-020-01099-4.
- [18] S. Hall and L. Liebenberg, “Qualitative Description as an Introductory Method to Qualitative Research for Master’s-Level Students and Research Trainees,” *Int. J. Qual. Methods*, vol. 23, Jan. 2024, doi: 10.1177/16094069241242264.
- [19] K. A. Rendle, C. M. Abramson, S. B. Garrett, M. C. Halley, and D. Dohan, “Beyond exploratory: a tailored framework for designing and assessing qualitative health research,” *BMJ Open*, vol. 9, no. 8, p. e030123, Aug. 2019, doi: 10.1136/bmjopen-2019-030123.
- [20] P. Villamin, V. Lopez, D. K. Thapa, and M. Cleary, “A Worked Example of Qualitative Descriptive Design: A Step-by-Step Guide for Novice and Early Career Researchers,” *J. Adv. Nurs.*, Oct. 2024, doi: 10.1111/jan.16481.
- [21] J. T. Burdine, S. Thorne, and G. Sandhu, “Interpretive description: A flexible qualitative methodology for medical education research,” *Med. Educ.*, vol. 55, pp. 341–348, 2020, doi: 10.1111/medu.14380.
- [22] E. Barroga *et al.*, “Conducting and Writing Quantitative and Qualitative Research,” *J. Korean Med. Sci.*, vol. 38, no. 37, 2023, doi: 10.3346/jkms.2023.38.e291.
- [23] H. H. Chai, S. S. Gao, K. J. Chen, D. Duangthip, E. C. M. Lo, and C. H. Chu, “A Concise Review on Qualitative Research in Dentistry,” *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 18, no. 3, p. 942, Jan. 2021, doi: 10.3390/ijerph18030942.
- [24] P. Aspers and U. Corte, “What is Qualitative in Qualitative Research,” *Qual. Sociol.*, vol. 42, no. 2, pp. 139–160, Jun. 2019, doi: 10.1007/s11133-019-9413-7.
- [25] A. N. Bahasoan, C. Anwar, R. I. Khaldun, and T. H. B. Tahawa, “The influence of economic growth on manpower absorption in Central Sulawesi,” *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 343, no. 1, p. 012253, Oct. 2019, doi: 10.1088/1755-1315/343/1/012253.
- [26] M. I. R. Rantung, J. Mantiri, M. M. Pontoh, and E. H. Polii, “Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa,” *Acad. Educ. J.*, vol. 15, no. 1, pp. 543–552, Jan. 2024, doi: 10.47200/aoej.v15i1.2251.

- [27] D. Kreismann and T. Talaulicar, "Business Ethics Training in Human Resource Development: A Literature Review," *Hum. Resour. Dev. Rev.*, vol. 20, no. 1, pp. 68–105, Mar. 2021, doi: 10.1177/1534484320983533.
- [28] M.-C. Matei, L.-C. Abrudan, and M.-M. Abrudan, "Financial Perspectives on Human Capital: Building Sustainable HR Strategies," *Sustainability*, vol. 16, no. 4, p. 1441, Feb. 2024, doi: 10.3390/su16041441.
- [29] F. Manzoor, L. Wei, T. Bányai, M. Nurunnabi, and Q. A. Subhan, "An Examination of Sustainable HRM Practices on Job Performance: An Application of Training as a Moderator," *Sustainability*, vol. 11, no. 8, p. 2263, Apr. 2019, doi: 10.3390/su11082263.
- [30] V. Bogina, A. Hartman, T. Kuflik, and A. Shulner-Tal, "Educating Software and AI Stakeholders About Algorithmic Fairness, Accountability, Transparency and Ethics," *Int. J. Artif. Intell. Educ.*, vol. 32, no. 3, pp. 808–833, Sep. 2022, doi: 10.1007/s40593-021-00248-0.
- [31] J. Garcia-Lacalle and L. Torres, "Financial Reporting Quality and Online Disclosure Practices in Spanish Governmental Agencies," *Sustainability*, vol. 13, no. 5, p. 2437, Feb. 2021, doi: 10.3390/su13052437.
- [32] G. H. Tumbel, D. S. R. Siwij, M. I. R. Rantung, E. H. Polii, and F. Mokodompit, "Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency," Atlantis Press SARL, 2023, pp. 1985–1993. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0_238.
- [33] K. T. Hayes, H. J. Heiman, and P. A. Honoré, "Developing a management and finance training for future public health leaders," *Front. Public Heal.*, vol. 11, May 2023, doi: 10.3389/fpubh.2023.1125155.
- [34] G. Puron-Cid, C. G. Reddick, and S. Ganapati, "Public value of online financial transparency," *Int. J. Public Sect. Manag.*, vol. 32, no. 5, pp. 467–488, Jul. 2019, doi: 10.1108/IJPSM-03-2018-0073.
- [35] W. Bogar, "Determinants of Employee Creativity," *Int. J. Prof. Bus. Rev.*, vol. 8, no. 6, p. e02219, Jun. 2023, doi: 10.26668/businessreview/2023.v8i6.2219.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN